

KELEMBAGAAN BANK SENTRAL

Here is where your presentation begins

Outline

01

Konsep dan Teori Kelembagaan Bank Sentral.

02

Evolusi Kelembagaan Bank Sentral.

03

Fungsi dan Peran Bank Sentral Modern.

04

Mandat dan Tujuan Bank Sentral Modern.

05

Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga
Pemerintah Domestik dan Lembaga

06

Tata Kelola Bank Sentral: Independensi,
Akuntabilitas, Transparansi.

07

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara.

Konsep dan Teori Kelembagaan Bank Sentral

- Kelembagaan bank sentral telah banyak berkembang sejak pertama kali muncul sekitar 400 tahun lalu.
- Awalnya, bank sentral berperan sebagai penyimpan dan penyortir uang koin dan pada beberapa kasus tertentu menjadi sumber dana untuk perang.
- Seiring waktu fungsi bank sentral berkembang menjadi penerbit uang, sebagai bank untuk pemerintah dan bank yang lain, pengawas sistem keuangan, pengawas bank, serta pembuat kebijakan moneter.

Konsep dan Teori Kelembagaan Bank Sentral

- Saat ini, terdapat peran yang sama dan berbeda di antara bank sentral di dunia.
- Peran yang sama antara lain.
 - Fokus ke stabilitas moneter.
 - Fokus ke stabilitas keuangan.
 - Larangan untuk melakukan pinjaman langsung ke pemerintah.
- Peran yang berbeda antara lain.
 - Operasional dan kelembagaan yang berbeda untuk mewujudkan stabilitas moneter dan keuangan.
 - Peran bank sentral untuk mewujudkan kondisi *full employment*.

Evolusi Kelembagaan Bank Sentral



Evolusi Kelembagaan Bank Sentral

Dua guncangan minyak (*oil shocks*) dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi. Praktisi dan akademisi menyarankan agar bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk melakukan stabilisasi harga.

Pada tahun 1979, The Fed memutuskan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dengan pengetatan kebijakan moneter dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah beredar. Pada akhir tahun 1980an, kebijakan target jumlah beredar ditinggalkan karena hubungan antara uang dan output tidak stabil.

Oil Shocks
1970an

Liberalisasi sistem keuangan menyebabkan aliran modal ke negara berkembang menjadi lebih banyak. Sejak awal 1990an bank sentral baik di negara maju maupun berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi.

**Liberalisasi Sistem
Keuangan**
1990an

Uni Eropa terbentuk dan mengadopsi mata uang yang sama untuk negara anggotanya, yaitu euro. European Central Bank (ECB) terbentuk untuk menjalankan kebijakan moneter untuk negara anggota Uni Eropa.

**Uni Eropa
Awal 2000**

Evolusi Kelembagaan Bank Sentral

Krisis keuangan global terjadi yang disebabkan karena *subprime crisis* di Amerika Serikat. Dalam merespon kondisi ini, Indonesia mulai membentuk komite Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

**Krisis keuangan
global 2007-2010**

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk pada tahun 2011 dengan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB).
- Terbitnya UU tentang Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) sebagaimana selama ini dimandatkan dalam UU Bank Indonesia, UU tentang Perbankan dan UU tentang Perbankan Syariah.
- Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang OJK terletak pada penegasan bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan domain Bank Indonesia, serta pengalihan tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang mikroprudensial kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang OJK.

**Otoritas Jasa
Keuangan
2011**

UU No. 9 Tahun 2016: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Pokok Pengaturan

- Pencegahan, yang meliputi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.
- Penanganan krisis sistem keuangan.
- Penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis.

Instansi

- **Terkait** terkait koordinasi dalam penetapan bank sistemik dan pemberian PLJP/S
- LPS: a.l terkait penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada BI untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan pendirian *bridge bank* yang tunduk pula pada ketentuan BI di bidang perbankan
- Kemenkeu: a.l terkait kedudukan Kemenkeu sebagai Koordinator KSSK



Keterkaitan dengan BI

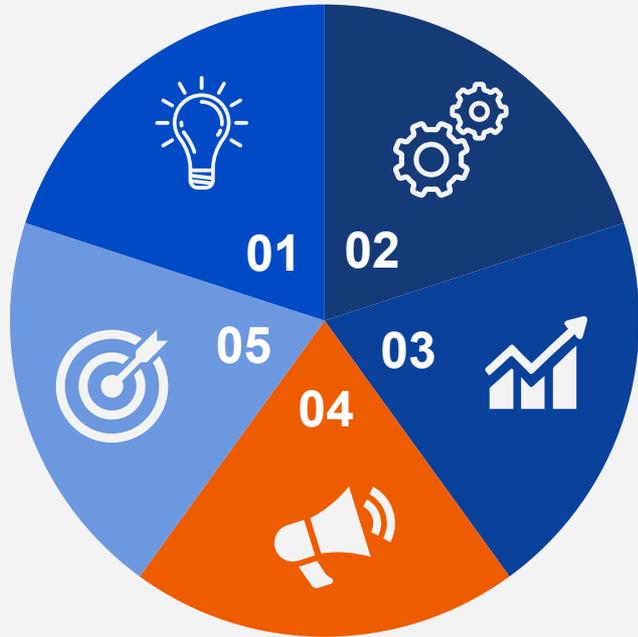
- Dalam rangka penanganan likuiditas bank sistemik, Bank Indonesia menyediakan PLJP/PLJPS
- Dalam rangka penanganan solvabilitas bank sistemik, berdasarkan keputusan KSSK, Bank Indonesia dapat membeli Surat Berharga Negara yang dimiliki oleh LPS.
- Dalam kondisi krisis sistem keuangan, berdasarkan keputusan KSSK, Bank Indonesia juga dapat melakukan pembelian Surat Berharga Negara milik LPS untuk mendanai penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik.

Fungsi dan Peran Bank Sentral Modern

Bank Sentral modern memiliki peran untuk menjaga stabilisasi kondisi perekonomian melalui:

1. Stabilitas Moneter : melalui kebijakan mempertahankan nilai tukar.
2. Stabilitas Keuangan : Bank Sentral membentuk sistem keuangan untuk berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber daya perekonomian.

Fungsi dan Peran Bank Sentral Modern



01

Penerbitan
uang.

02

Merencanakan dan
melakukan
eksekusi kebijakan
moneter.

03

Menyediakan
fasilitas sistem
pembayaran.

04

Pengawasan
perbankan.

05

*Lender of last
resort.*

Fungsi dan Peran Bank Sentral Modern : Penerbitan dan Penedaran Uang

- Sebagian besar negara saat ini menerbitkan uang melalui bank sentral masing-masing negara tersebut.
- Uang yang dicetak memiliki tanda tangan dari Gubernur/Ketua Bank Sentral dan Menteri Keuangan di setiap negara.
- Bank sentral di beberapa negara saat ini dapat mencetak uang dengan melakukan kredit ke akun bank komersial yang terdaftar di sistem keuangan perbankan secara elektronik.
- Proses uang yang dicetak oleh Bank Sentral (baik elektronik maupun fisik) melalui *money creation process*. Proses ini akan mempengaruhi sirkulasi perekonomian.

Fungsi dan Peran Bank Sentral Modern: Penentu kebijakan moneter.

- Peran bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter disebabkan karena bank sentral adalah satu-satunya otoritas yang berhak menerbitkan uang dan mampu mengendalikan *reserve requirement*.
- Pada praktik bank sentral modern, bank sentral lebih memilih menggunakan kebijakan suku bunga acuan dan operasi pasar keuangan sebagai alat kebijakan moneter. Kebijakan seperti target uang beredar mulai ditinggalkan karena hubungan antara level uang beredar dan *base money* tidak stabil.
- Di era sistem keuangan yang modern, ketika jumlah uang beredar terlalu banyak, bank sentral dapat meningkatkan tingkat suku bunga acuan. Ketika suku bunga acuan meningkat, *opportunity cost* dari memegang uang meningkat dan pemberi pinjaman menjadi lebih selektif dalam meminjamkan uangnya.

Fungsi dan Peran Bank Sentral Modern: Sistem pembayaran.

Sebagai regulator sistem pembayaran, bank sentral menetapkan peraturan dan panduan terkait sistem pembayaran.

Tujuan bank sentral sebagai regulator antara lain.

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan sistem pembayaran.
2. Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.
3. Memastikan keadilan dalam penggunaan sistem pembayaran.

Sebagai penyedia fasilitas sistem pembayaran, bank sentral memiliki peran penting terutama dalam sistem pembayaran antarbank.

Fungsi dan Peran Bank Sentral Modern

Peran dan Fungsi Bank Sentral Modern

	Stabilitas Moneter	Stabilitas Keuangan
Peran	Mempertahankan stabilitas nilai tukar	Menjaga efektifitas fungsi sistem keuangan dan ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian.
Fungsi	1. Penerbitan Uang.	1. Mengawasi sistem pembayaran.
	2. Menerbitkan peraturan tentang kondisi uang.	2. <i>Lender of last resort</i> . 3. Pengawasan Perbankan.

- Saat ini, kebijakan dalam mengawasi sistem pembayaran juga memiliki fokus untuk mengawasi sistem pembayaran daring dan elektronik.
- Salah satu contohnya adalah Bank Indonesia saat ini sedang mempopulerkan QRIS, yaitu standar QR code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking*.

Mandat dan Tujuan Bank Sentral Modern

- Mandat penting dari Bank Sentral yang modern melibatkan stabilitas moneter, keuangan dan *full employment*.
- 3 mandat tersebut saling berhubungan dan bisa menimbulkan konflik maupun sinergi, tergantung pada konteks dan horizon waktu yang diterapkan. Pada jangka pendek, stabilitas berkonflik dengan *full employment*.
- Pada jangka panjang stabilitas moneter mampu menjadi fondasi yang kuat bagi kondisi *full employment*. Pada kondisi ini pula kondisi stabilitas moneter harus didukung dengan stabilitas keuangan.

Mandat dan Tujuan Bank Sentral Modern

- Stabilitas moneter tercermin dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kondisi ini juga mencerminkan stabilitas harga dan di beberapa negara menunjukkan stabilitas nilai tukar.
- Selain stabilitas moneter, bank sentral juga memiliki mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pentingnya stabilitas sistem keuangan disebabkan oleh:
 - (1) Pentingnya efektifitas dalam mengalokasikan dana.
 - (2) Berhubungan dengan stabilitas moneter.
 - (3) Kondisi stabilitas keuangan terkait dengan peran tradisional bank sentral seperti sistem pembayaran, *lender of last resort* dan pengawasan perbankan.

Mandat dan Tujuan Bank Sentral Modern

- Sejak krisis keuangan tahun 2007-2010, terdapat evaluasi terhadap mandat bank sentral.
- Evaluasi tersebut dengan pertimbangan bahwa kebijakan moneter harus mempertimbangkan stabilitas keuangan sebagai komplemen dari stabilitas moneter.
- Alat kebijakan makroprudensial dapat menjadi komplemen dari kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga Pemerintah Domestik dan Lembaga Internasional

Pada penjelasan bagian ini, hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga terkait menjadi aplikasi pembahasan.

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, yaitu:

1. Sebagai *counterpart* pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi-asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBN
2. Sebagai pemegang kas pemerintah
3. Dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak creditor luar negeri
4. Memberikan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan (nasional dan daerah)

Sumber: Modul Kelembagaan Lama

Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga Pemerintah Domestik dan Lembaga Internasional

Koordinasi dengan pemerintah dan DPR:

- Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang kepada pemerintah.
- Bank Indonesia menyampaikan laporan triwulanan dan sewaktu-waktu kepada DPR tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.
- Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia dalam rapat kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI.
- Pemerintah dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur BI dengan hak bicara, tetapi tanpa hak suara.

Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga Pemerintah Domestik dan Lembaga Internasional

Hubungan Internasional

Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang: (i) intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, (ii) penyelesaian transaksi lintas negara, (iii) hubungan koresponden, (iv) tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan bank, dan (v) pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran

Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional:

- 1) The South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre),
- 2) The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision (SEANZA).
- 3) The Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP),
- 4) ASEAN Central Bank Forum (ACBF), dan
- 5) Bank for International Settlement (BIS)

Sumber: Modul Kelembagaan Lama

Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga Pemerintah Domestik dan Lembaga Internasional

Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional:

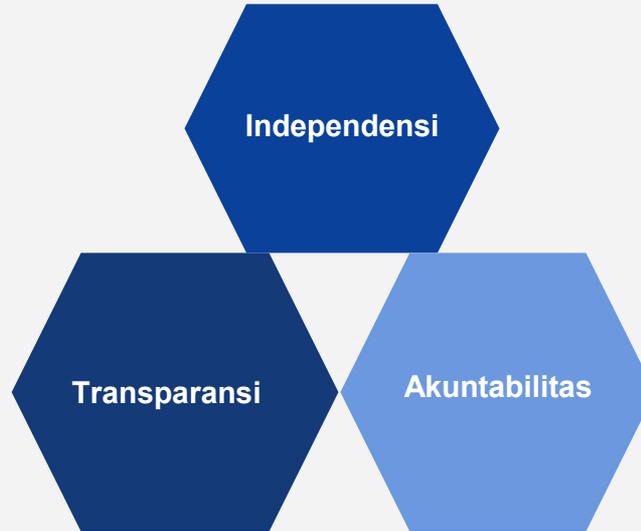
- 1) Association of South East Asian Nations (ASEAN)
- 2) ASEAN + 3 (ASEAN + China, Jepang, dan Korea)
- 3) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
- 4) Manila Framework Group (MFG)
- 5) Asia-Europe Meeting (ASEM)
- 6) Islamic Development Bank (IDB)
- 7) International Monetary Fund (IMF)
- 8) World Bank, termasuk keanggotaan di International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Cooperation (IFC), dan Multiateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
- 9) World Trade Organization (WTO)
- 10) Intergovernmental Group of 20 (G20)
- 11) Intergovernmental Group of 15 (G15 sebagai observer), dan
- 12) Intergovernmental Group of 24 (G24 sebagai observer)

Sumber: Modul Kelembagaan Lama

Tata Kelola Bank Sentral

Independensi

- Bagian ini juga membahas aplikasi tata kelola Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 tahun 1999
 - Secara kelembagaan berada di luar pemerintah
 - Memiliki kewenangan membuat peraturan dan menetapkan sanksi sebagai implementasi pelaksanaan UU
 - Kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter (inflasi atau pertumbuhan ekonomi) sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam UU
 - Kebebasan menggunakan instrumen moneter & menetapkan target operasional kebijakan moneter
 - Kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga, larangan pemberian pinjaman kepada pemerintah
- Sumber: Modul Kelembagaan Lama



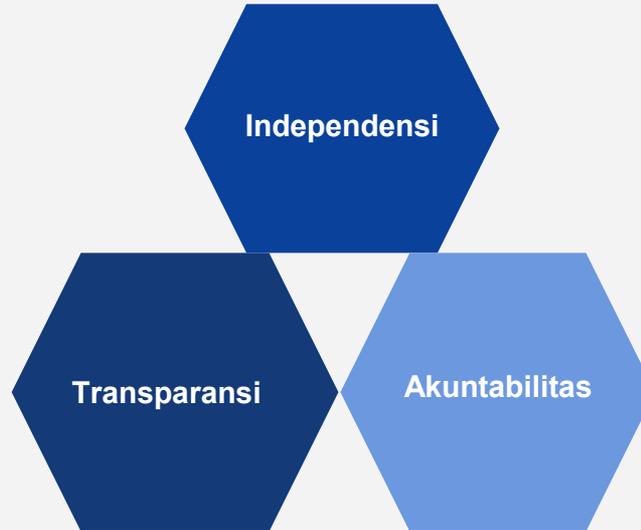
Independensi

- Kewenangan Dewan Gubernur menolak campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan UU
- Pemimpin BI berada di luar susunan kabinet dan memiliki masa jabatan berbeda dengan pemerintah
- Kewenangan menetapkan, mengelola anggaran kebijakan & aset kekayaan tanpa persetujuan DPR
- Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaporkan kepada DPR

Tata Kelola Bank Sentral

Transparansi

- Keterbukaan mengenai tujuan kebijakan seperti sasaran stabilitas harga atau inflasi
- Pengungkapan data, model dan prakiraan ekonomi
- Informasi mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan internal
- Komunikasi keputusan kebijakan, spt perubahan suku bunga
- Keterbukaan pelaksanaan kebijakan yang diputuskan seperti operasi moneter



Akuntabilitas

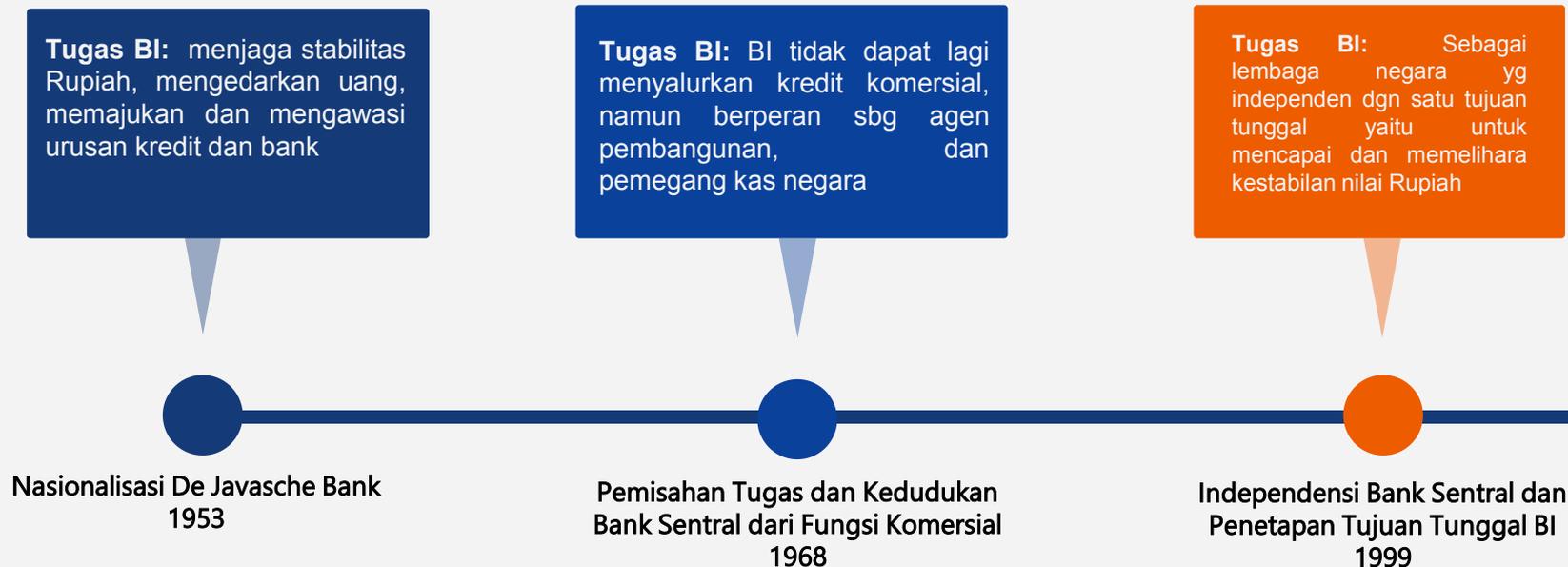
- Penyampaian laporan tugas.
- Laporan bahan evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPR.
- DPR meminta penjelasan pelaksana tugas & wewenang BI.
- Penyampaian anggaran operasional untuk persetujuan DPR & kewajiban pelaporan anggaran kebijakan secara khusus ke DPR.
- Pemeriksaan keuangan oleh BPK.
- Penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat.
- Badan Supervisi Bank Indonesia.

Evolusi Bank Indonesia

- Kelembagaan bank sentral di Indonesia dimulai dengan pendirian DE JAVASCHE BANK NV yang berevolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral saat ini
- De javasche bank didirikan tahun 1822 sebagai bank komersial.
- Tahun 1828 pertama kali memperoleh hak octrooi (hak mengedarkan uang) dari Pemerintahan Hindia Belanda
- 1 Januari 1828 s.d 31 Maret 1921 sebagai bank sirkulasi Gulden (mata uang Belanda) untuk wilayah Hindia Belanda.
- Pada tahun 1922, melalui penetapan UU De Javasche-bank wet, fungsi diperluas:
 1. Mengeluarkan uang kertas bank,
 2. Memberikan layanan jasa bank: pengiriman uang, rekening giro/deposito, negosiasi wesel luar negeri, kredit, diskonto wesel luar negeri,
 3. kasir pemerintah dan memberikan kredit kepada Pemerintah,
 4. Menyelenggarakan kliring antar bank,
 5. Melaksanakan pengawasan bank.

Sumber: Modul Kelembagaan Lama

Evolusi Bank Indonesia



Evolusi Bank Indonesia

“Negara memiliki suatu bank sentral yg susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur degan Undang-Undang”
UUD 1945 Pasal 23D

Penguatan Kedudukan Bank Sentral
sebagai Otoritas Moneter
2002

Penegasan kedudukan bank sentral yg independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, penataan fungsi pengawasan BI

Penyempurnaan Pengaturan Tugas
dan Wewenang Bank Indonesia
2004

“Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi”
UU No. 6 Tahun 2009

Independensi Bank Indonesia
2009

Perbedaan Praktik Bank Sentral

Aspek	Federal Reserve	European Central Bank	Bank of England
Independensi	Pembagian kewenangan 3 entitas penting, Federal Reserve Banks, FOMC, dan Dewan Gubernur membuat The Fed merupakan salah satu Bank Sentral dengan independensi kuat.	Maastricht Treaty yang merupakan perjanjian untuk membentuk <i>Eurosystem</i> menyebabkan ECB menjadi bank sentral paling independen di dunia.	Bank of England tidak tergabung dalam European Monetary Union, sehingga institusi ini independen terhadap European Central Bank.
Dewan Gubernur	<ol style="list-style-type: none">Berjumlah 7 dan semuanya merupakan anggota dari FOMC. Dewan gubernur ini memiliki mayoritas suara yang lebih banyak dibandingkan presiden direktur dari distrik yang terpilih.Mampu melakukan kontrol ketika <i>discount rate</i> tidak sesuai dengan <i>federal funds rate target</i>.	Terdiri dari 6 anggota Dewan Eksekutif ditambah dengan gubernur bank sentral dari 19 perwakilan negara euro.	Dewan gubernur dari Bank of England terdiri dari gubernur dan 2 deputi gubernur yang ditunjuk untuk 5 tahun masa jabatan, serta direktur non-eksekutif yang ditunjuk untuk 3 tahun masa jabatan.

Perbedaan Praktik Bank Sentral

Aspek	Bank of Canada	Bank of Japan
Independensi	Pada praktiknya, Bank of Canada melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter. Ketika terjadi konflik dengan bank yang menjadi anggotanya, Menteri keuangan dapat mengeluarkan surat perintah agar bank yang menjadi anggota untuk patuh terhadap keputusan bank sentral.	Sampai saat ini, Bank of Japan tidak sepenuhnya independen dari pemerintah, terutama dari pengaruh Menteri Keuangan.
Dewan Gubernur	Dewan gubernur terdiri dari 4 deputi gubernur dan 1 gubernur. Dewan gubernur memiliki kewenangan yang sama seperti FOMC.	Kebijakan moneter ditentukan oleh dewan kebijakan bank yang terdiri dari gubernur, 2 wakil gubernur, dan 6 anggota yang dipilih oleh cabinet dan disetujui oleh parlemen.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: Federal Reserve Banks



Federal Reserve
Banks



Board of Governors
(Dewan Gubernur) of
the Federal Reserve
System



Federal Open
Market Committee
(FOMC)

- Pembuat undang-undang Federal Reserve membagi kewenangan bank sentral dengan mempertimbangkan koordinasi dengan setiap negara bagian, sektor swasta dan pemerintah, serta publik secara umum. Pembagian kewenangan tersebut tercermin pada pembentukan 3 entitas penting.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: Federal Reserve Banks

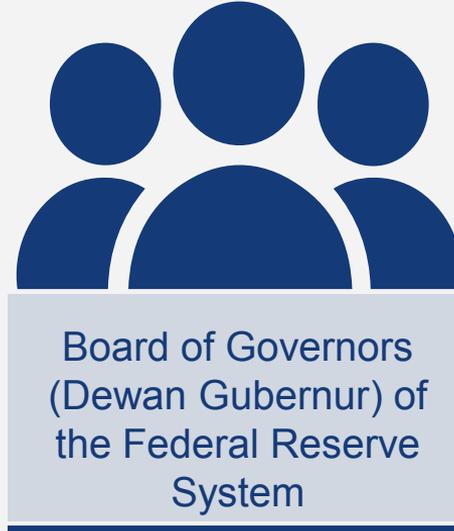
- Terdapat 12 Federal Reserve District, dimana setiap distrik memiliki minimal satu Federal Reserve Bank. Federal Reserve Bank dari setiap distrik terbagi menjadi bank utama dan cabang.
- 3 Federal Reserve Banks terbesar (dalam asset) terdapat di New York, Chicago, dan San Francisco. Jumlah asset dari ketiganya mencapai lebih dari 50% total aset Federal Reserve System.
- Setiap Federal Reserve Bank sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah.
- Setiap Federal Reserve Bank memiliki peran dalam kebijakan moneter:



- Setiap Federal Reserve Bank memiliki peran dalam kebijakan moneter:
 1. Setiap direktur dari Federal Reserve Bank menetapkan *discount rate*, walaupun pada praktiknya *discount rate* ditetapkan sesuai Batasan pada *federal funds rate target*.
 2. Menentukan tujuan pemberian *discount loans* dari Federal Reserve Banks.
 3. 5 dari 12 presiden direktur memiliki hak suara dalam Federal Open Market Committee yang berperan pada operasi pasar. Presiden direktur dari New York merupakan anggota tetap FOMC. Hal ini menyebabkan New York Fed adalah bank terpenting dari Federal Reserve Banks.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: Federal Reserve Banks

- Semua bank nasional (Bank yang mendapat izin operasi dari *Office of the Comptroller of the Currency*) diwajibkan menjadi anggota dari Federal Reserve System.



- Dewan Gubernur secara aktif terlibat dalam kebijakan moneter dengan cara sebagai berikut.
 1. Dewan gubernur berjumlah 7 dan semuanya merupakan anggota dari FOMC. Dewan gubernur ini memiliki mayoritas suara yang lebih banyak dibandingkan presiden direktur dari distrik yang terpilih.
 2. Mampu melakukan kontrol ketika *discount rate* tidak sesuai dengan *federal funds rate target*.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: Federal Reserve Banks

FOMC biasanya bertemu 8 kali dalam setahun. Pada setiap pertemuannya, dihasilkan keputusan terkait pelaksanaan operasi pasar dan penentuan *federal funds rate target*.



FOMC memiliki peran sangat penting dalam struktur The Fed. FOMC mampu menentukan jalannya pelaksanaan operasi pasar dan menentukan apakah kebijakan moneter ingin diketatkan atau dilonggarkan.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: European Central Bank

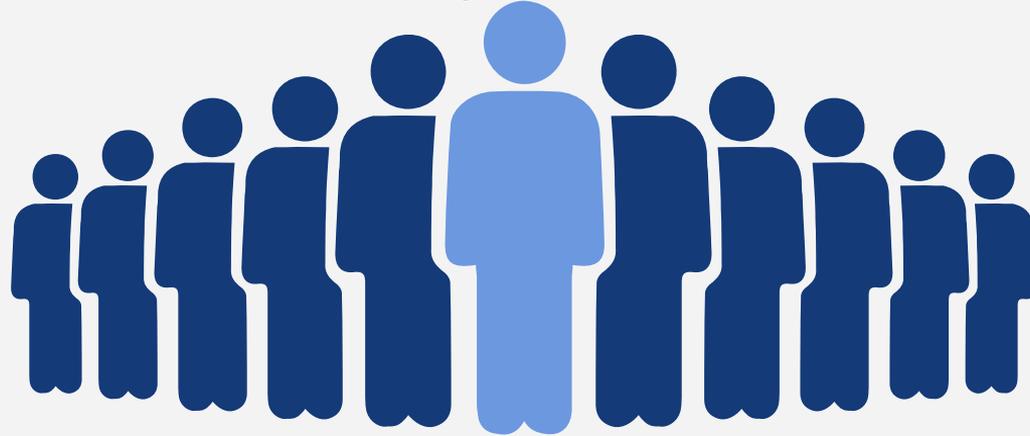
- European Central Bank (ECB) didirikan pada Januari 1999 bersamaan dengan pendirian European System of Central Banks (ESCB).
- Dewan gubernur ECB memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan ECB, dengan 6 anggota Dewan Eksekutif ditambah dengan gubernur bank sentral dari 19 perwakilan negara euro.



- Tujuan utama dari dewan gubernur adalah membuat kebijakan moneter untuk area Euro. Kebijakan tersebut terkait dengan tujuan kebijakan moneter zona Euro, otorisasi dari masalah nilai tukar setiap negara anggota, perubahan suku bunga acuan, dan pengawasan terhadap cadangan devisa.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: European Central Bank

Independensi



Sumber: Mishkin (2016)

- Maastricht Treaty yang merupakan perjanjian untuk membentuk *Eurosystem* menyebabkan ECB menjadi bank sentral paling independen di dunia. Berikut merupakan alasannya.
- Anggota Dewan Eksekutif memiliki masa jabatan 8 tahun dan gubernur bank sentral dari setiap negara anggota harus memiliki masa jabatan minimal 5 tahun.
- Eurosystem memiliki hak budget dan pemerintah dari negara anggota tidak diperbolehkan membuat kebijakan untuk mempengaruhi ECB.
- ECB juga dilarang menerima pinjaman dari sektor publik dengan tujuan untuk terhindar dari kepentingan otoritas publik.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: Bank of England



Kelembagaan

Bank of England tidak tergabung dalam European Monetary Union, sehingga institusi ini independen terhadap European Central Bank.



Board of Governors

Dewan gubernur dari Bank of England terdiri dari gubernur dan 2 deputy gubernur yang ditunjuk untuk 5 tahun masa jabatan, serta direktur non-eksekutif yang ditunjuk untuk 3 tahun masa jabatan.



Kebijakan

Kewenangan untuk menetapkan suku bunga acuan terdapat di Monetary Policy Committee yang beranggotakan gubernur, 2 deputy gubernur, 2 anggota internal bank sentral, dan 4 ahli yang direkomendasikan oleh menteri keuangan.

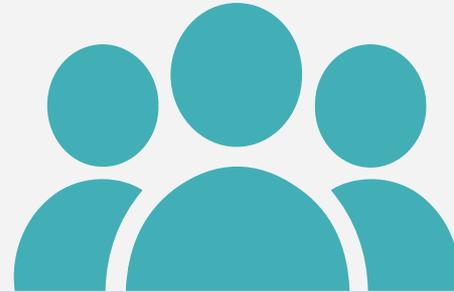
- Didirikan pada tahun 1694 dan menjadi bank sentral tertua kedua di dunia.

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: Bank of Canada



Board of Governors

Dewan gubernur terdiri dari 4 deputy gubernur dan 1 gubernur. Dewan gubernur memiliki kewenangan yang sama seperti FOMC.



Kebijakan

Pada praktiknya, Bank of Canada melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter. Ketika terjadi konflik dengan bank yang menjadi anggotanya, Menteri keuangan dapat mengeluarkan surat perintah agar bank yang menjadi anggota untuk patuh terhadap keputusan bank sentral.

- Bank of Canada didirikan tahun 1934, dengan strukturnya terdiri dari direktur dengan masa jabatan 3 tahun dan gubernur dengan masa jabatan 7 tahun

Sumber: Mishkin (2016)

Praktik Bank Sentral di Berbagai Negara: Bank of Japan



Board of Governors

Kebijakan moneter ditentukan oleh dewan kebijakan bank yang terdiri dari gubernur, 2 wakil gubernur, dan 6 anggota yang dipilih oleh cabinet dan disetujui oleh parlemen.



Kelembagaan

Sampai saat ini, Bank of Japan tidak sepenuhnya independent dari pemerintah, terutama dari pengaruh Menteri Keuangan.

- Bank of Japan (Nippon Ginko) didirikan pada tahun 1882 saat masa Restorasi Meiji.



THANKS